



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
UNIT KERJA : DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YULIANUS
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 813897

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.475.000.000**

1. Tanah Seluas 1400 m2 di BENGKAYANG, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
2. Tanah Seluas 15000 m2 di BENGKAYANG, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
3. Tanah Seluas 378 m2 di KOTA PONTIANAK , HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000
4. Tanah Seluas 480 m2 di KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 131 m2/125 m2 di KOTA PONTIANAK , WARISAN Rp. 130.000.000
6. Tanah Seluas 6723 m2 di KOTA PONTIANAK , WARISAN Rp. 800.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 76 m2/60 m2 di KOTA PONTIANAK , HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **162.000.000**

1. MOBIL, DAIHATSU TAFT GT Tahun 1994, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. MOTOR, YAMAHA AEROX B65-A Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000



3. MOBIL, TOYOTA YARIS TIPE E Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp.
50.000.000

4. MOTOR, YAMAHA MIO G 2BJ Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.
2.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 61.310.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 146.528.600

F. HARTA LAINNYA Rp. 100.000.000

Sub Total Rp. 1.944.838.600

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.944.838.600

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.